

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang ada pada bab sebelumnya maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, bahwa:

1. Aspek keterbukaan (transparansi) diterapkan oleh pengurus lembaga kemasyarakatan, baik itu RT maupun RW di lingkungan RT 05 RW 04 Wiguna Timur Surabaya. Transparansi dilakukan oleh pengurus secara sadar sebagai bentuk pertanggung jawaban terhadap warganya. Dengan diterapkannya transparansi akan menimbulkan rasa percaya warga terhadap pengurus dalam mengelola lembaga dan secara langsung dapat berdampak terhadap kelancaran operasional lembaga. Transparansi kegiatan operasional sebagian besar disampaikan melalui WA Grup yang berisikan pengurus RT dan RW beserta perwakilan warga dari masing-masing kartu keluarga. Penerapan komunikasi lewat satu pintu memang baik, namun kurang efektif. Dengan keterbatasan warga dalam mengakses Grup WA tersebut menyebabkan terbatasnya juga penyampaian informasi kepada warga yang tidak masuk sebagai anggota Grup WA.
2. Aspek pertanggungjawaban (akuntabilitas) diterapkan oleh RT dan RW di lingkungan RT 05 RW 04 Wiguna Timur Surabaya dilakukan dengan cara menyusun prosedur pelaksanaan tugas yang jelas dan pelaksanaan pengawasan internal oleh masing-masing pengurus. Upaya pertanggungjawaban pengurus RT juga didorong dengan bantuan warga diluar susunan pengurus. Keterlibatan warga sebagai pelaksana dalam penerapan kebijakan dapat membangun rasa saling peduli, tanggung jawab dan gotong royong di dalam diri tiap warganya dan dapat meminimalisir .
3. Maksimalisasi sumber daya dilaksanakan oleh RT dan RW di lingkungan RT 05 RW 04 Wiguna Timur Surabaya dengan cara memaksimalkan pengurus RT dan RW dalam mengatasi segala permasalahan di masyarakat. Dengan memaksimalkan kinerja pengurus dalam mengatasi permasalahan

kemasyarakatan dapat menumbuhkan tindakan kooperatif dari warganya dan meminimalisir konflik yang berkepanjangan antar warganya.

4. Peran lembaga mendorong partisipasi warga terus diupayakan ada dan berkembang oleh warga serta pengurus RT dan RW di lingkungan RT 05 RW 04 Wiguna Timur Surabaya dengan melakukan pendekatan kepada warga-warga yang kurang berpartisipasi. Pendekatan yang kooperatif kepada komponen masyarakat dapat meningkatkan rasa saling peduli dan kebersamaan yang mewujudkan kelancaran operasional lembaga.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas dan pengalaman selama proses penelitian, maka peneliti dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pengurus RW

Selaku pemegang kekuasaan tertinggi di susunan lembaga kemasyarakatan di lingkungan RT 05 RW 04 Wiguna Timur Surabaya yang memiliki peran penuh untuk menyusun kebijakan, respon yang cepat dan tepat yang sebelumnya telah dilaksanakan harus dipertahankan dan terus dilakukan evaluasi untuk menciptakan perbaikan pada sistem tata kelolanya.

2. Bagi Pengurus RT

Sebagai seorang yang berperan penuh untuk menjaga kenyamanan hidup rukun bertetangga dan sebagai media yang menyambung kebutuhan warga RT 05 Wiguna Timur Surabaya harus bisa lebih memperhatikan kebutuhan sosial warga di lingkungannya, melakukan evaluasi rutin terkait pelaksanaan tugas yang telah dilakukan oleh masing-masing pengurus RT.

3. Bagi Warga Masyarakat RT 05 RW 04 Wiguna Timur Surabaya

Warga yang bertempat tinggal di wilayah RT 05 RW 04 Wiguna Timur Surabaya berhak mendapatkan pelayanan admistrasidan pemenuhan kebutuhan sosial, akan tetapi dari hak yang dimiliki, warga juga memiliki kewajiban untuk taat dengan aturan yang sebelumnya telah disusun dan sepakati oleh komponen lembaga serta warga juga harus meningkatkan

partisipasinya dalam pelaksanaan kegiatan yang telah disusun oleh RT maupun RW.

#### 4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperkaya studi yang telah dilakukan dengan menggali lebih dalam mengenai setiap faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penerapan *good governance* pada sektor pelayanan publik.

### **5.3 Keterbatasan Penelitian**

Keterbatasan dalam penelitian ini mencakup subjektivitas dari peneliti, yang dapat mempengaruhi interpretasi makna yang disiratkan dalam wawancara dan meningkatkan risiko bias. Untuk mengatasi hal ini, penelitian menggunakan proses triangulasi. Triangulasi sumber dilakukan dengan memeriksa data dengan fakta dari berbagai informan dan penelitian lainnya. Sedangkan triangulasi metode dilakukan dengan menggunakan beberapa metode pengumpulan data, seperti wawancara mendalam dan observasi, untuk memperkuat validitas data yang diperoleh.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adena, et al. (2022). Penerapan Konsep Good Government Governance Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Selatan. 2(April), 70–81.
- Ardiansyah, Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. *Jurnal IHSAN : Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 1–9. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57>
- Ayuningtyas, D. W. (2020). Penerapan Good Governance Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Keimigrasian. *Journal of Administration and International Development*, 1(1), 1–13. <https://doi.org/10.52617/jaid.v1i1.223>
- Budi, S. & B. (2007). Sekretariat Tim Pengembangan Kebijakan Nasional Tata Pemerintahan yang Baik.
- Chinn. Richard. (2000). *Corporate Governance Handbook*. Gee Publishing Ltd.
- Daniri, M. A. (2014). *Lead by GCG. Gagas Bisnis Indonesia*.
- Hadi, A., Asrori, & Rusman. (2021). *Buku Penelitian Kualitatif Studi Fenomenologi, Case Study, Grounded Theory, Etnografi, Biografi (pertama)*. CV. Pena Persada.
- Komite Nasional Kebijakan Governance. (2010). *Konsep dan Pedoman Umum Good Governance*. KNKG.
- Lexy J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Mahmudi. (2005). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Penerbit Buku UPP AMP YKPN.
- Oktavia, A. (2022). Analisis penerapan Good Governance terhadap pelayanan publik di Kantor Kecamatan Baturaja Barat. 5(4). <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue>
- Oktavia, A., & Trisninawati. (2022). Analisis Penerapan Good Governance terhadap pelayanan publik di Kantor Kecamatan Baturaja Barat. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 5(4), 2022.
- Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000. (n.d.).
- Santoso, T. (2020). *Memahami Modal Sosial*. CV Saga Jawadwipa.
- Sedarmayanti. (2009). *Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance (Kepemerintahan yang Baik)*. Penerbit Mandar Maju.
- Setyasih, E. T. (2023). Implementation of Good Governance in public services in Blanakan District, Subang Regency. In *ENDLESS: International Journal of Futures Studies* (Vol. 6, Issue 1).

<http://influence-journal.net/index.php/endless>

Soekanto. Soerjono. (2002). Sosiologi Suatu Pengantar. Raja Grando Prasada.

Subhi, G. N., & Yuhertiana, I. (2021). Peran SDM dan Teknologi Informasi pada Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua. EQUITY, 24(2), 141–156.

<https://doi.org/10.34209/equ.v24i2.2468>

Sumaryadi, N. (2016). Revormasi Birokrasi Pemerintahan. Penerbit Ghalia Indonesia.

Sutedi, A. (2011). Good Corporate Governance. Sinar Grafika.

### **Perundang-Undangan**

Menteri Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000